



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01.401968

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2026

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG 401968**

**Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni 2026**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
PANGKALPINANG - Babel
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**).

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.

NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	08
V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya.....	09
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	12
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
A.3. Basis Akuntansi.....	13
A.4. Dasar Pengukuran.....	13
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	23
B.1. Pendapatan.....	24
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	27
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	27
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	27
C.3. Persediaan.....	27
C.4. Tanah.....	29
C.5. Peralatan dan Mesin.....	29
C.6. Gedung dan Bangunan.....	29
C.7. Aset Tetap Lainnya.....	29

C.8.	Akumulasi Penyusutan.....	30
C.9.	Aset Lainnya.....	30
C.10.	Uang Muka dari KPPN.....	31
C.11.	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan.....	31
C.12.	Ekuitas.....	31
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	32
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2.	Beban Pegawai.....	33
D.3.	Beban Persediaan.....	33
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	34
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	35
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	35
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	36
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	36
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1.	Ekuitas Awal.....	37
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	37
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	37
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	37
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	38
E.5.	Ekuitas Akhir.....	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	39
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	39
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	39
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

JL. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Terpadu, Pangkalpinang - BABEL

Telp. 0717-911151, e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I 2026 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I 2026 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Nayalla Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang SEMESTER I 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada 2026 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp.0,-** dari estimasi pendapatannya sebesar **Rp 134.000,-**

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar **Rp 10.481.325.152,-** atau mencapai **56% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.615.095.000,-**

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 25.621.193.617,-** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 62.035.724,- ; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 25.559.157.893,- Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.039.673.896,- Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 24.581.519.721,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp 25.621.193.617,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.10.606.459.966,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.10.606.459.966,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa bernilai Rp 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) - LO sebesar (Rp.10.606.459.966) .

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 24.706.654.535,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp.10.606.459.966,-), kemudian ditambah dengan koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 10.481.325.152,- menghasilkan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp. (125.134.814,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai **Rp. 24.581.519.721,-**

5. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Berisi informasi keuangan tertentu yang tersaji sampai dengan 30 Juni 2026 . Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi pendukung atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	2026			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	134.000	0	(134.000)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	134.000	0	(134.000)	0
B	BELANJA				0
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	18.615.095.000	10.481.325.152	(8.133.769.848)	56
	BELANJA PEGAWAI	16.510.108.000	9.546.431.348	(6.963.676.652)	58
	BELANJA BARANG	2.014.167.000	934.893.804	(1.079.273.196)	46
	BELANJA MODAL	90.820.000	0	(90.820.000)	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	II. TRANSFER KE DAERAH	0	0	0	0
	DANA BAGI HASIL	0	0	0	0
	DANA ALOKASI UMUM	0	0	0	0
	DANATRANSFER KHUSUS	0	0	0	0
	DANA OTONOMI KHUSUS	0	0	0	0
	DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0	0	0	0
	DANA DESA	0	0	0	0
	DANA INSENTIF FISKAL	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	18.615.095.000	10.481.325.152	(8.133.769.848)	56
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	36.000.000	0	36.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.275.000	0	4.275.000	0
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	0	325,600	(325,600)	(100)
Persediaan	21.760.724	19.320.240	2.440.484	12.63
JUMLAH ASET LANCAR	62.035.724	19.320.240	42.389.884	215,77
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	7,664,791,903	0	0.00
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(8.711.151.999)	(7,843,768,304)	(867.383.695)	11,06
JUMLAH ASET TETAP	25.559.157.893	26.426.541.588	(867.383.695)	(3,28)
Aset Lain-lain	0	20.290.000	(20.290.000)	(100)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0	(20.290.000)	20.290.000	(100)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	25.621.193.617	26.446.187.428	(824.993.811)	(3,12)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	962.671.396	1.739.532.893	(776.861.497)	(44,66)
Utang Yang Belum Ditagihkan	41.002.500	0	41.002.500	0
Uang MUka dari KPPN	36.000.000	0	36.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.039.673.896	1.739.532.893	(699.858.997)	(40,23)
JUMLAH KEWAJIBAN	1.039.673.896	1.739.532.893	(699.858.997)	(40,23)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24.581.519.721	24.706.654.535	(125.134.814)	(0,51)
JUMLAH EKUITAS	24.581.519.721	24.706.654.535	(125.134.814)	(0,51)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.621.193.617	26.446.187.428	(824.993.811)	(3,12)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	8.784.150.423	2.192.019.662	6.592.130.761	300,733
Beban Persediaan	27.219.100	15.514.890	11.704.210	75,439
Beban Barang dan Jasa	565.436.022	339.506.500	225.929.522	66,546
Beban Pemeliharaan	322.077.895	185.862.156	136.215.739	73,289
Beban Perjalanan Dinas	40.192.831	37.892.010	2.363.821	6,249
Beban Penyusutan dan Amortisasi	867.383.695	913.303.422	(45.919.727)	(5,028)
JUMLAH BEBAN	10.606.459.966	3.684.035.640	6.922.424.326	187,903
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,903
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,903
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT – LO	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,903

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2025	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24.706.654.535	27.692.750.778	2.986.096.243)	(10,78)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,9
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10.481.325.152	2.786.157.769	7.695.167.383	276,19
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(125.134.814)	(897.877.871)	772.743.057	(86,06)
EKUITAS AKHIR	24.581.519.721	26.794.872.907	(2.213.353.186)	(8,26)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V.LAPORAN KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya

A. Laporan Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 Juni 2026

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
A. Pagu	16.510.108.000	2.014.167.000	90.820.000	18.615.095.000
B. Realisasi s.d 30 Juni 2026	9.546.431.348	934.893.804	0	10.481.325.152
C. % Realisasi s.d 30 Juni 2026	58%	46%	0%	56%
D. Pagu Blokir	-	-	-	-
E. % Realisasi setelah memperhitungkan pagu blokir (B/(A-D))	58%	46%	0%	56%
F. Trajectory IKPA	-	-	-	-
G. Sisa pagu s.d 30 Juni 2026 termasuk blokir (A-B)	6.963.676.652	1.079.273.196	90.820.000	8.133.769.848

Sampai dengan Juni Semester I 2026, realisasi belanja pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar Rp. 10.481.325.152 atau setara dengan 56%.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran Per 30 Juni 2026

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	015	005	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,21 20 19,84	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,80	99,65 25 24,91	99,65	99,75	100,00%	0,00	99,75

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 99,75 % dan jika dikonversi bobot 100% dan nilai akhir 99,75

2. Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA JUNI SEMESTER I 2026

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Rincian Output	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
005.01.WA.1 071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	90.820.000	90.820.000	0	20	0	Unit	99	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
005.01.WA.6 986.EBA.962	Layanan Umum	1.440.000	0	0	2	1	Laporan	99	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
005.01.WA.6 986.EBA.994	Layanan Perkantoran	18.522.535.000	10.481.025.188	56,59	2	1	Layanan	65,33	
005.01.WA.6 986.EBA.953	Layanan pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100	1	1	Dokumen	100	
	Total	18.615.095.000	10.481.325.152	99,18					

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahunan semester I 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Modul Aset Tetap SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan 22 (dua puluh dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. **Revisi I** tanggal 24 JUNI 2025 berupa Revisi Efisiensi Anggaran Sehubungan dengan Direktif Presiden.
2. **Revisi II** tanggal 6 Februari 2026 berupa Revisi Penambahan PAGU Tunjangan Jabatan Hakim dan Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026.
3. **Revisi III** tanggal 6 Maret 2026 berupa Revisi Pemutakhiran POK Terkait Penambahan Detil Belanja Tunjangan Beras Gaji ke 13 dan 14.
4. **Revisi IV** tanggal 9 April 2026 tentang Revisi ABT Belanja Gaji Pegawai (SP SABA)
5. **Revisi V** tanggal 15 April 2026 berupa Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
6. **Revisi VI** tanggal 17 Juni 2026 tentang Revisi ABT PAGU Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
7. **Revisi VII** tanggal 24 Juni 2026 tentang Revisi Pemutakhiran POK.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	6.927.529.000	16.510.108.000
Belanja Barang	2.001.886.000	2.014.167.000
Belanja Modal	133.086,000	90.820.000
Jumlah Belanja	9.062.501,000	18.615.095.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp. 0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,-

No.	Uraian	2026		
		Anggaran	Realisasi	% Real
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	134.000	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB
Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I 2026

No.	Uraian	TA 2026
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
Total Pendapatan		0

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara :
Rp10.481.325.152*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 10.481.325.152 ,- atau sebesar 56,31% dari anggaran senilai Rp. 18.615.095.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2026 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026

Uraian	2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	16.510.108.000	9.546.431.384	57,82
Belanja Barang	2.014.167.000	934.893.804	46,42
Belanja Modal	90.820.000	0	0
Total Belanja Bruto	18.615.095.000	10.481.325.188	56,31
Pengembalian Belanja	0	36	0,00
Total Belanja Netto	18.615.095.000	10.481.325.152	56,31

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026, yakni sebesar Rp 2.786.157.769,- yang menyerap 61% anggaran dari total PAGU Rp 4.589.857.000,-, Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan penurunan persentase sebesar 5%.

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp9.546.431.348*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 9.546.431.348,- yang terdiri dari belanja pegawai bruto Rp.9.546.431.384,- dan pengembalian belanja sebesar Rp. 36- . Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp.934.893.804*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 934.893.804,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 4.538.000*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 4.538.000,- Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Uang di bank senilai 4.275.000 merupakan uang transportasi hakim bulan Mei 2026 yang belum diberikan ke hakim.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2026

Uraian	2026
Uang Tunai di Brankas	263.000
Uang di Bank	4.275.000
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	35.737.000
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	40.275.000

*Kas di Bendahara
Penerimaan:
Rp 0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026

Uraian	2026
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp21.760.724*

Persediaan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.21.760.724,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 Juni TA 2025

Uraian	2026
Barang Konsumsi	17.781.040
Bahan Untuk Pemeliharaan	3.979.684
Total	21.760.724

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan berita acara stock opname fisik .

C.4. Tanah

Tanah merupakan aset tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional kantor. Tanah memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak diperjualbelikan dalam jalannya kegiatan kantor. Aset tetap berupa tanah dalam akuntansi dinilai berdasarkan harga perolehan. Tanah Per 30 Juni 2026 disajikan senilai Rp 25.308.000,-.

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 adalah Rp. 7,664,791,903,- dengan nilai buku sebesar Rp 1.329.353.946,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	7,664,791,903
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklas Masuk	0
Mutasi Kurang	(0)
Reklas Keluar	(0)
Saldo per 30 Juni 2026	7,664,791,903
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(6.335.437.957)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	1.329.353.946

C.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan sebesar Rp 26,580,019,989,- dengan akumulasi penyusutan senilai Rp (2.375.714.042),-, sehingga nilai buku menjadi sebesar Rp 24.204.305.947,-. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2022. Nilai gedung dan bangunan berasal dari segala pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan

siap digunakan meliputi biaya perencanaan, konstruksi, pengawasan, dan biaya administrasi lain-lain.

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset. Aset tetap lainnya disajikan sebesar Rp 190.000,- yang merupakan 2 buah monografi.

C.8. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 30 Juni 2026 adalah sebesar **Rp (8.711.151.999,-)** yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset Peralatan dan Mesin senilai Rp 6.335.437.957,- dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp. 2.375.714.042.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9. Aset Lainnya

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Aset lain-lain Per 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp 20.290.000,- yang merupakan peralatan dan mesin berupa mesin absensi senilai Rp 6.100.000,-, kursi besi/metal senilai Rp 4.200.000,-, PC senilai Rp 9.990.000,- yang dihentikan

C.10. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 36.000.000,-
Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.11. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo utang kepada pihak ketiga Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 962.671.396,- dan utang yang belum ditagihkan 41.002.500,- .

C.12. Ekuitas

Ekuitas:
Rp 24.581.519.721,-

Ekuitas per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 24.581.519.721,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah Rp. 0

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 2026

Uraian	2026	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
Total Pendapatan	0	0

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp.8.784.150.423,-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.8.784.150.423,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026		
calk_lo_akun_satker_poc		
Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	819,493,640
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,530
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-36
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,401,338
511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,667,522
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	31,410,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,533,102
511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,499,680
511129	Beban Uang Makan PNS	82,352,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	69,380,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	44,550,000
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,496,677,940
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,960,900,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	124,319,250
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,215
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,071,987
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,182,255
511628	Beban Uang Makan PPPK	18,865,000
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,910,000
JUMLAH		8,784,150,423

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan:
Rp.27.219.100

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp 27.219.100,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026

Uraian	2026
Beban Persediaan Konsumsi	27.219.100
Total Beban Persediaan	27.219.100

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp.565.436.022,-*

Jumlah Beban Jasa per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 565.436.022,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026		
calk_lo_akun_satker_poc		
Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	369,901,500
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	340,000
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,550,000
521211	Beban Bahan	300,000
522111	Beban Langganan Listrik	82,414,322
522112	Beban Langganan Telepon	2,155,200
522141	Beban Sewa	91,775,000
JUMLAH		565,436,022

D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan:**
Rp 322.077.895,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 322.077.895,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026			<i>calc_lo_akun_satker_poc</i>
Akun	Uraian	Jumlah	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165,311,800	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143,864,579	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12,901,516	
JUMLAH		322,077,895	

D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban Perjalanan
Dinas :**
Rp.40.192.831

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Juni Semester I 2026 sebesar Rp. 40.192.831,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN PERJALANAN DALAM NEGERI TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026			<i>calc_lo_akun_satker_poc</i>
Akun	Uraian	Jumlah	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40,192,831	
JUMLAH		40,192,831	

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi :
Rp. 867.383.695,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2026 sebesar Rp.867.383.695,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026		
calk_lo_akun_satker_poc		
Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	601,547,742
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265,835,953
JUMLAH		867,383,695

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional : Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Semester I 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026

Uraian	2026
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.24.706.654.535,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp. 24.706.654.535,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO
: (Rp10.606.459.966,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar (Rp.10.606.459.966,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi:
Rp 0

Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai berkurang aset gedung dan bangunan

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar
Entitas :
Rp10.481.325.152,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 10.481.325.152,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.481.325.152
Diterima Dari Entitas Lain	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	10.481.325.152

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar Rp. -0 ,- sedangkan DKEL sebesar Rp.10.481.325.152,-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp.24.581.519.721,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 24.581.519.721,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Pengungkapan atas Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Tidak ada PAGU Belanja penanganan Pandemi Covid-19 pada Semester I TA 2026.

F.2.2. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Semester I 2026.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 4.275.000 merupakan saldo transportasi hakim bulan Mei 2026 yang belum dikirim.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 887.000 merupakan data UP yang masih di bank
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp 6.288.920.

F.2.5. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2026 terdapat 7 (tujuh) Revisi DIPA yaitu:

1. **Revisi I** tanggal 24 JUNI 2025 berupa Revisi Efisiensi Anggaran Sehubungan dengan Direktif Presiden.
2. **Revisi II** tanggal 6 Februari 2026 berupa Revisi Penambahan PAGU Tunjangan Jabatan Hakim dan Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026.
3. **Revisi III** tanggal 6 Maret 2026 berupa Revisi Pemutakhiran POK Terkait Penambahan Detil Belanja Tunjangan Beras Gaji ke 13 dan 14.
4. **Revisi IV** tanggal 9 April 2026 tentang Revisi ABT Belanja Gaji Pegawai (SP SABA)
5. **Revisi V** tanggal 15 April 2026 berupa Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
6. **Revisi VI** tanggal 17 Juni 2026 tentang Revisi ABT PAGU Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
7. **Revisi VII** tanggal 24 Juni 2026 tentang Revisi Pemutakhiran POK.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2026 tidak terdapat koreksi SPM, SSBP dan SSPB

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan semester I 2026 ini.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	8,784,150,423	2,192,019,662	6,592,130,761	300.733
Beban Persediaan	27,219,100	15,514,890	11,704,210	75.439
Beban Barang dan Jasa	565,436,022	339,506,500	225,929,522	66.546
Beban Pemeliharaan	322,077,895	185,862,156	136,215,739	73.289
Beban Perjalanan Dinas	40,192,831	37,829,010	2,363,821	6.249
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

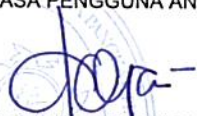
Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	867,383,695	913,303,422	(45,919,727)	(5.028)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,606,459,966	3,684,035,640	6,922,424,326	187.903
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,606,459,966)	(3,684,035,640)	(6,922,424,326)	187.903
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,606,459,966)	(3,684,035,640)	(6,922,424,326)	187.903
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,606,459,966)	(3,684,035,640)	(6,922,424,326)	187.903

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN




DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP. 198112292006042015

RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	819,493,640
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,530
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-36
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,401,338
511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,667,522
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	31,410,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,533,102
511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,499,680
511129	Beban Uang Makan PNS	82,352,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	69,380,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	44,550,000
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,496,677,940
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,960,900,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	124,319,250
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,215
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,071,987
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,182,255
511628	Beban Uang Makan PPPK	18,865,000
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,910,000
JUMLAH		8,784,150,423

RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165,311,800
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143,864,579
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12,901,516
JUMLAH		322,077,895

RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	601,547,742
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265,835,953
JUMLAH		867,383,695

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0	36,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,275,000	0	4,275,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	325,600	(325,600)	(100.00)
Persediaan	21,760,724	19,320,240	2,440,484	12.63
JUMLAH ASET LANCAR	62,035,724	19,645,840	42,389,884	215.77
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	7,664,791,903	0	0.00
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(8,711,151,999)	(7,843,768,304)	(867,383,695)	11.06
JUMLAH ASET TETAP	25,559,157,893	26,426,541,588	(867,383,695)	(3.28)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	20,290,000	(20,290,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(20,290,000)	20,290,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	25,621,193,617	26,446,187,428	(824,993,811)	(3.12)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	962,671,396	1,739,532,893	(776,861,497)	(44.66)
Utang Yang Belum Ditagihkan	41,002,500	0	41,002,500	0.00
Uang Muka dari KPPN	36,000,000	0	36,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,039,673,896	1,739,532,893	(699,858,997)	(40.23)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,039,673,896	1,739,532,893	(699,858,997)	(40.23)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,581,519,721	24,706,654,535	(125,134,814)	(0.51)
JUMLAH EKUITAS	24,581,519,721	24,706,654,535	(125,134,814)	(0.51)
JUMLAH EKUITAS	24,581,519,721	24,706,654,535	(125,134,814)	(0.51)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,621,193,617	26,446,187,428	(824,993,811)	(3.12)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 23/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,481,325,152
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	726,013,240	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,234	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	38,472,578	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	8,575,344	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	27,920,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,401,081	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	32,444,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	82,352,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	53,420,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	44,550,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,749,386,641	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	6,613,400,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	109,250,250	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,704	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,820,837	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,675,315	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	18,865,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,830,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	368,118,900	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	226,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,550,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,127,600	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	100,843,929	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,581,165	0
3.0	522141	Belanja Sewa	91,775,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132,568,800	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142,609,579	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,192,831	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	36
JUMLAH			10,481,325,188	10,481,325,188

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DORA NATALIA SINGARIMBUN
198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,275,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,781,040	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,979,684	0
0.0	131111	Tanah	25,308,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,335,437,957
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,375,714,042
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	958,396,396
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,275,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	41,002,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	36,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,481,325,152
0.0	391111	Ekuitas	0	24,706,654,535
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	819,493,640	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,494	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,401,338	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,667,522	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	31,410,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,533,102	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,499,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	82,352,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	69,380,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	44,550,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,496,677,940	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,960,900,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	124,319,250	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,215	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,071,987	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,182,255	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	18,865,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,910,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	369,901,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	340,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,550,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	82,414,322	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,155,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	91,775,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165,311,800	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143,864,579	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40,192,831	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	601,547,742	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265,835,953	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	27,219,100	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12,901,516	0
JUMLAH			44,938,805,582	44,938,805,582

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401968

Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 1
lap_irra_face_saker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak								
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	134,000		(134,000)	0				
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	134,000		(134,000)	0				
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	134,000		(134,000)	0				
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat								
1. Belanja Pegawai	18,615,095,000	10,481,325,152	(8,133,769,848)	56	4,589,857,000	2,786,157,769	1,803,699,231	61
2. Belanja Barang	16,510,108,000	9,546,431,348	(6,963,676,652)	58	2,951,916,000	1,958,367,939	993,548,061	66
3. Belanja Modal	2,014,167,000	934,893,804	(1,079,273,196)	46	1,237,963,000	517,789,830	720,173,170	42
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	90,820,000		(90,820,000)	0	399,978,000	310,000,000	89,978,000	78
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah								
1. Dana Bagi Hasil								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401968

Tgl Data : 23/07/26 9:46 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 2
lap_fra_face_salker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	18,615,095,000	10,481,325,152	(8,133,769,848)	56	4,589,857,000	2,786,157,769	1,803,699,231	61
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP. 198112292006042015



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/07/26 11:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	134,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	134,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	134,000	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	134,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	134,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/26 11:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/7/26 9:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		1,252,411,000	726,013,240	0	726,013,240	57.97	526,397,760
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	890,870,000	14,000	11,234	36	11,198	79.99	2,802
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	89,089,000	89,089,000	38,472,578	0	38,472,578	43.18	50,616,422
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,533,000	13,533,000	8,575,344	0	8,575,344	63.37	4,957,656
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39,670,000	39,670,000	23,040,000	0	23,040,000	58.08	16,630,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,206,594,000	1,206,594,000	27,920,000	0	27,920,000	2.31	1,178,674,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	212,396,000	212,396,000	5,401,081	0	5,401,081	2.54	206,994,919
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	36,119,000	36,117,000	32,444,160	0	32,444,160	89.83	3,672,840
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	163,449,000	163,449,000	82,352,000	0	82,352,000	50.38	81,097,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,578,000	7,578,000	53,420,000	0	53,420,000	704.94	(45,842,000)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	178,200,000	178,200,000	44,550,000	0	44,550,000	25	133,650,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,837,512,000	3,199,051,000	1,042,199,637	36	1,042,199,601	32.58	2,156,851,399
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	590,000,000	2,434,827,000	1,749,386,641	0	1,749,386,641	71.85	685,440,359
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,444,561,000	10,820,772,000	6,613,400,000	0	6,613,400,000	61.12	4,207,372,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	4,034,561,000	13,255,599,000	8,362,786,641	0	8,362,786,641	63.09	4,892,812,359
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,000	3,000	109,250,250	0	109,250,250	3,641,675	(109,247,250)
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	3,000	3,704	0	3,704	123.47	(704)
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,000	3,000	1,820,837	0	1,820,837	60,694.57	(1,817,837)
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,000	3,000	3,675,315	0	3,675,315	122,510.5	(3,672,315)
511628	Belanja Uang Makan PPPK	55,440,000	55,440,000	18,865,000	0	18,865,000	34.03	36,575,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,000	3,000	7,830,000	0	7,830,000	261,000	(7,827,000)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	55,456,000	55,458,000	141,445,106	0	141,445,106	255.05	(85,987,106)
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,927,529,000	16,510,108,000	9,546,431,384	36	9,546,431,348	57.82	6,963,676,652
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	755,859,000	771,668,000	368,118,900	0	368,118,900	47.7	403,549,100
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	6,000,000	226,000	0	226,000	3.77	5,774,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44,520,000	44,520,000	18,550,000	0	18,550,000	41.67	25,970,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	806,379,000	822,188,000	386,894,900	0	386,894,900	47.06	435,293,100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/26 11:43 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/7/26 9:58 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	300,000	0	300,000	17.24	1,440,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51,770,000	51,770,000	37,127,600	0	37,127,600	71.72	14,642,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	51,770,000	51,770,000	37,127,600	0	37,127,600	71.72	14,642,400
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	238,008,000	222,406,000	100,843,929	0	100,843,929	45.34	121,562,071
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	6,000,000	2,581,165	0	2,581,165	43.02	3,418,835
522141	Belanja Sewa	197,720,000	197,720,000	91,775,000	0	91,775,000	46.42	105,945,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	441,728,000	426,126,000	195,200,094	0	195,200,094	45.81	230,925,906
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	333,659,000	310,576,000	132,568,800	0	132,568,800	42.68	178,007,200
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	289,642,000	325,159,000	142,609,579	0	142,609,579	43.86	182,549,421
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	623,301,000	635,735,000	275,178,379	0	275,178,379	43.29	360,556,621
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,608,000	76,608,000	40,192,831	0	40,192,831	52.47	36,415,169
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	76,608,000	76,608,000	40,192,831	0	40,192,831	52.47	36,415,169
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,001,886,000	2,014,167,000	934,893,804	0	934,893,804	46.42	1,079,273,196
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0	0	0	0	90,820,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133,086,000	90,820,000	0	0	0	0	90,820,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	133,086,000	90,820,000	0	0	0	0	90,820,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	133,086,000	90,820,000	0	0	0	0	90,820,000
	JUMLAH BELANJA	9,062,501,000	18,615,095,000	10,481,325,188	36	10,481,325,152	56.31	8,133,769,848

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 23/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 23/07/26 11:42 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,606,459,966)	(3,684,035,640)	(6,922,424,326)	187.9
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,481,325,152	2,786,157,769	7,695,167,383	276.19
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(125,134,814)	(897,877,871)	772,743,057	(86.06)
EKUITAS AKHIR	24,581,519,721	26,794,872,907	(2,213,353,186)	(8.26)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

RINCIAN KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2026	2025
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10,481,325,152	2,786,157,769
313121	Diterima dari Entitas Lain	0	0
313221	Transfer Masuk	0	0
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
511111	Beban Gaji Pokok PNS	-819,493,640	-648,945,240
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-819,493,640	-648,945,240
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	-5,533,102	-4,748,299
511126	Beban Tunj. Beras PNS	-36,499,680	-25,709,100
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-36,499,680	-25,709,100
511129	Beban Uang Makan PNS	-82,352,000	-59,231,000
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-82,352,000	-59,231,000
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-12,494	-8,799
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-12,494	-8,799
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-43,401,338	-33,452,010
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-43,401,338	-33,452,010
511122	Beban Tunj. Anak PNS	-9,667,522	-7,988,606
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-9,667,522	-7,988,606
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	-25,920,000	-25,920,000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-25,920,000	-25,920,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	-31,410,000	-32,460,000
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-31,410,000	-32,460,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	-5,533,102	-4,748,299
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	-69,380,000	-5,690,000
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-69,380,000	-5,690,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-44,550,000	-47,250,000
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-44,550,000	-47,250,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	-124,319,250	0
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	-124,319,250	0
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	-4,215	0
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-4,215	0
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-2,071,987	0
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-2,071,987	0
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	-4,182,255	0
511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	-4,182,255	0
511628	Beban Uang Makan PPPK	-18,865,000	0
511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-18,865,000	0
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	-8,910,000	0
511633	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PPPK	-8,910,000	0
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-1,496,677,940	-215,816,608
511324	Pengembalian Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-1,496,677,940	-215,816,608
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-5,960,900,000	-1,084,800,000
511339	Pengembalian Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-5,960,900,000	-1,084,800,000
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-165,311,800	-129,401,256
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-143,864,579	-54,116,350
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-143,864,579	-54,116,350

591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-601,547,742	-647,467,469
591111	Pengembalian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-601,547,742	-647,467,469
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-265,835,953	-265,835,953
591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-265,835,953	-265,835,953
522111	Beban Langganan Listrik	-82,414,322	0
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	-82,414,322	0
522112	Beban Langganan Telepon	-2,155,200	-2,162,800
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	-2,155,200	-2,162,800
522113	Beban Langganan Air	0	0
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	0
522141	Beban Sewa	-91,775,000	-35,240,000
522141	Pengembalian Beban Sewa	-91,775,000	-35,240,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-40,192,831	-37,189,010
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-40,192,831	-37,189,010
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-640,000
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-640,000
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	0	0
592222	Pengembalian Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	0	0
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-165,311,800	-129,401,256
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	0
521211	Beban Bahan	-300,000	-300,000
521211	Pengembalian Beban Bahan	-300,000	-300,000
593111	Beban Persediaan konsumsi	-27,219,100	-15,514,890
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-27,219,100	-15,514,890
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-12,901,516	-2,344,550
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-12,901,516	-2,344,550
521111	Beban Keperluan Perkantoran	-369,901,500	-279,001,100
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-369,901,500	-279,001,100
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	-650,000
521252	Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	-650,000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-340,000	-402,600
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-340,000	-402,600
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-18,550,000	-21,750,000
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-18,550,000	-21,750,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	0	0
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	0
null	null	0	0
JUMLAH		-10,731,594,780	-4,581,913,511

RINCIAN SURPLUS/DEFISIT-LO TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2026	2025
391112	Surplus/Defisit-LO	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
511111	Beban Gaji Pokok PNS	-819,493,640	-648,945,240
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-819,493,640	-648,945,240
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	-5,533,102	-4,748,299
511126	Beban Tunj. Beras PNS	-36,499,680	-25,709,100
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-36,499,680	-25,709,100
511129	Beban Uang Makan PNS	-82,352,000	-59,231,000
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-82,352,000	-59,231,000
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-12,494	-8,799
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-12,494	-8,799
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-43,401,338	-33,452,010
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-43,401,338	-33,452,010
511122	Beban Tunj. Anak PNS	-9,667,522	-7,988,606
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-9,667,522	-7,988,606
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	-25,920,000	-25,920,000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-25,920,000	-25,920,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	-31,410,000	-32,460,000
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-31,410,000	-32,460,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	-5,533,102	-4,748,299
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	-69,380,000	-5,690,000
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-69,380,000	-5,690,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-44,550,000	-47,250,000
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-44,550,000	-47,250,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	-124,319,250	0
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	-124,319,250	0
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	-4,215	0
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-4,215	0
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-2,071,987	0
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-2,071,987	0
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	-4,182,255	0
511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	-4,182,255	0
511628	Beban Uang Makan PPPK	-18,865,000	0
511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-18,865,000	0
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	-8,910,000	0
511633	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PPPK	-8,910,000	0
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-1,496,677,940	-215,816,608
511324	Pengembalian Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-1,496,677,940	-215,816,608
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-5,960,900,000	-1,084,800,000
511339	Pengembalian Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-5,960,900,000	-1,084,800,000
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-165,311,800	-129,401,256
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-143,864,579	-54,116,350
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-143,864,579	-54,116,350
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-601,547,742	-647,467,469
591111	Pengembalian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-601,547,742	-647,467,469
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-265,835,953	-265,835,953

591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-265,835,953	-265,835,953
522111	Beban Langganan Listrik	-82,414,322	0
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	-82,414,322	0
522112	Beban Langganan Telepon	-2,155,200	-2,162,800
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	-2,155,200	-2,162,800
522113	Beban Langganan Air	0	0
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	0
522141	Beban Sewa	-91,775,000	-35,240,000
522141	Pengembalian Beban Sewa	-91,775,000	-35,240,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-40,192,831	-37,189,010
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-40,192,831	-37,189,010
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-640,000
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-640,000
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	0	0
592222	Pengembalian Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	0	0
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-165,311,800	-129,401,256
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	0
521211	Beban Bahan	-300,000	-300,000
521211	Pengembalian Beban Bahan	-300,000	-300,000
593111	Beban Persediaan konsumsi	-27,219,100	-15,514,890
593111	Pen	-27,219,100	

RINCIAN KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2026	2025
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0
JUMLAH		0	0

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2026	2025
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	10,481,325,152	2,786,157,769
313121	Diterima dari Entitas Lain	0	0
313221	Transfer Masuk	0	0
JUMLAH		10,481,325,152	2,786,157,769



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG *SEMESTER 1 TAHUN 2026*

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Pengadilan ... Semester I Tahun Anggaran 2026, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Jakarta, 21 Juli 2026
 Sekretaris Sekretaris Pengadilan Tata
 Usaha Negara Pangkalpinang Sekretaris
 selaku Kuasa Pengguna Barang

Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M
 NIP. 19811229 200604 2 015



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaL dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (NAMA SATUAN KERJA) SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Semester I* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan LBKP *Semester I* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP *Semester I* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBP *Semester I* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MyIntress milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak



- Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp25.605.331.867,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp26.470.275.078,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp885.233.211,00;
 3. Saldo persediaan per 30 Juni 2026 adalah Rp21.760.724,00 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2026 sebesar Rp19.320.240,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp2.440.484,00 ;
 4. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian barang konsumsi dan barang untuk pemeliharaan; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp Rp2.440.484,00;
 5. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN; (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp20.290.000,00;
 6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
 7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP Semester I ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan



Barang Pengguna Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2026. Penyusunan LBKP *Semester I* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *Semester I* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *Semester I* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara



Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik



Negara;

- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2026 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan



mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam



Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2026 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan



penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang



memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dalam LBKP Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 30 Juni 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.



4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang



Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor ... Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp34.294.723.142,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp34.315.013.142,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp20.290.000,00 (*Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebesar Rp20.290.000,00 (*Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);



6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN;
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp34.315.013.142,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp34.290.599.892,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp24.413.250,00 (*Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 21.760.724,00 (*Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	16.096.240	1.684.800	17.781.040
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3.224.000	755.684	3.979.684

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 dan kondisi usang senilai Rp0,00 .

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 4.000 m² dengan nilai sebesar Rp 25.308.000,- (*Dua Puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah*). Mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	0

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	0



Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp.0,-. bidang dengan nilai sebesar Rp 0,- , sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0,-

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	4000	25.308.000,-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah (Jika Ada)

Realisasi belanja modal tanah per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0,00,-

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 478 buah dengan nilai sebesar Rp7.664.791.903,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 720.381 buah dengan nilai sebesar Rp7.664.791.903,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp 614.774.765,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal



sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp 614.774.765,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0,-	0,-
Reklasifikasi Masuk	0,-	0,-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	0,-	0,-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	4	614.774.765,-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp 726.585.363,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp 726.585.363,00 , mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-
Reklasifikasi Masuk	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat angkutan

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Dari jumlah Alat angkutan di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

- a. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)
-
- d. Alat Pertanian (3.04)
-

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 406 buah dengan nilai sebesar Rp 5.047.390.319,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0,-
Reklasifikasi Masuk	0	0

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	0	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 178.789.094,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 178.789.094,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.



g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp 19.771.640,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp 19.771.640,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

h. Alat Laboratorium (3.08)

-

i. Alat Persenjataan (3.09)

-

j. Komputer (3.10)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 85 buah dengan nilai sebesar Rp 1.101.893.972,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-
Reklasifikasi Masuk	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya



dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

- k. Alat Eksplorasi (3.11)
 -
- l. Alat Pengeboran (3.12)
 -
- m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)apa
 -
- n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)
 -
- o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)
 -
- p. Alat Peraga (3.16)
 -
- q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)
 -
- r. Rambu-Rambu (3.18)
 -
- s. Peralatan Olahraga (3.19)



Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 8.734.188.739,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp 8.711.151.999,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 23.036.740,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jika Ada)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0,00.

(data dapat diambil di aplikasi MonSAKTI: Monitoring Aset Tetap – Monitoring Belanja Modal vs Aset), filter sesuai jenis belanja)

1. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 26.580.019.989,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 26.580.019.989,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 .

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 25.256.592.619,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 25.256.592.619,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi masuk	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	2160	25.256.592.619
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

- b. Monumen (402)
-
- c. Bangunan Menara (403)
-



d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Tugu Titik Kontrol/ Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 1.323.427.370,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 1.323.427.370,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/ Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/ Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/ Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Tugu Titik Kontrol/ Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

Rincian data Tugu Titik Kontrol/ Pasti berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	800	1.323.427.370
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Tugu Titik Kontrol/ Pasti



Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp2.375.714.042,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp2.375.714.042,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan (jika ada)

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00.

2. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp 0,00 . Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan



Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan (Jika Ada)

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0,00.

3. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan



Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

- b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)
-
- c. Tanaman (6.05)
-
- d. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi

Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 16. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi



Dari jumlah aset tetap dalam renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0. Kelompok barang aset tetap dalam renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0,00 Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0,00

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00.

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 . Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00. Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

- a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga .

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

- 1) Software
Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.
Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.
- 2) Lisensi
-
- 3) Hak Kajian/Penelitian
-

4) Aset Tak Berwujud Lainnya

-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp20.290.000,00 (*Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp20.290.000,00.

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Alat Kantor	-	-
2. Komputer Unit	-	-
3. Alat Rumah Tangga	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0,00 sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp 0,00



menjadi Rp 0,00.

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00.

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0,00 sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya Rp 0,00 menjadi Rp 0,00.

6. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.



I. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 26,445,861,828 (Dua puluh Enam Miliar Empat ratus Empat puluh Lima Juta Delapan ratus Enam puluh Satu Ribu Delapan ratus Dua puluh Delapan Rupiah) nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	21.760.724	0,06	-	-	21.760.724	0,06
	Sub Jumlah (1)	21.760.724	0,06	-	-	21.760.724	0,06
II	Aset Tetap						
1	Tanah	25.308.000	0,07	-	-	25.308.000	0,07
2	Peralatan dan Mesin	7.664.791.903	22,35	24.413.250	100,00	7.689.205.153	22,41
3	Gedung dan Bangunan	26.580.019.989	77,51	-	-	26.580.019.989	77,46
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan		-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	190.000	0,00	-	-	190.000	0,00
6	KDP		-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	34.270.309.892	99,94	24.413.250	100,00	34.294.723.142	99,94
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (3)	-	-	-	-	-	-
	Total	34.292.070.616	100	24.413.250	100	34.316.483.866	100

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per
perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	-	-	-	-	-	-
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	(6.335.437.957)	72,73	(23.036.740)	100,00	(6.358.474.697)	72,80
3	Gedung dan Bangunan	(2.375.714.042)		-	-	(2.375.714.042)	27,20
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	0	-	-	-	-
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	(8.711.151.999)	100,00	(23.036.740)	100,00	(8.734.188.739)	100,00
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah		-	-	-	0	-
	Sub Jumlah (3)	0	-	-	-	0	-
	Total	(8.711.151.999)	100	(23.036.740)	100	(8.734.188.739)	100

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca



B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar			-
1	Persediaan	21.760.724	21.760.724	-
II	Aset Tetap			
1	Tanah	25.308.000	25.308.000	-
2	Peralatan dan Mesin	7.664.791.903	7.664.791.903	-
3	Gedung dan Bangunan	26.580.019.989	26.580.019.989	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 8.711.151.999	- 8.711.151.999	-
III	Aset Lainnya			
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain *)	-	-	-
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		25.580.918.617	25.580.918.617	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



II. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*AUDITED*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	23.872.519.405	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	31.185.363.842	7.312.844.437,00	31%
3	Laporan Unaudited 2023	29.472.191.781	- 1.713.172.061,00	-5%
4	Laporan Unaudited 2024	27.697.209.048	- 1.774.982.733,00	-6%
5	Laporan Unaudited 2025	26.445.861.828	- 1.251.347.220,00	-5%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Periode Laporan *AUDITED*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	0	1	25.308.000
2	Alat Angkutan Bermotor	2	342.600.000	4	383.985.363
3	Peralatan & Mesin NON TIK	13	243.985.338	414	4.982.765.715
4	Peralatan & Mesin Khusus TIK	9	31.499.998	70	1.000.373.974
5	Alat Berat	-	0	4	614.774.765
6	Alat Senjata	-	0	-	0
7	Bangunan Gedung	-	0	3	26.580.019.989
8	Rumah Negara	-	0	-	0
9	Jalan & Jembatan	-	0	-	0
10	Bangunan Air & Irigasi	-	0	-	0
11	Instalasi & Jaringan	-	0	-	0
12	Aset Tetap Lainnya	-	0	2	190.000
13	Aset Tak Berwujud	-	0	-	0
JUMLAH		24	618.085.336	498	33.587.417.806

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025



b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	2	0	0	0	0	0	0	2
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29 Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat
- Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0,00 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah
-
2. Tanah Belum Bersertipikat
-

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

-

g. Pengungkapan Penting Lainnya

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Gedung Kantor PTUN Tipe C	1

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya



A. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terkait ... (**Aset Tetap/Persediaan/dll**) dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



**GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang**

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama tahun 2025.

- a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
- Pada Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan	Peralatan dan Mesin	Disetujui
2	Pengadaan	Station Wagon	Tidak Disetujui
3	Pengadaan	Sepeda Motor	Tidak Disetujui
4	Pengasuransian	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	Disetujui

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 2 usulan dan tidak disetujui sebanyak 2 usulan

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk tahun 2027.”

Revisi RKBMN

- “Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mengajukan Revisi RKBMN untuk tahun 2027.”

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 498 unit dengan nilai sebesar Rp33.587.417.806,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 24 unit dengan nilai sebesar Rp618.085.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp)	Kuantitas (A+B)	Nilai
		(C)		(D)		(C+D)
Tanah	-	-	1	25.308.000	1	25.308.000
Alat Angkutan Bermotor	2	342.600.000	4	383.985.363	6	726.585.363
Peralatan & Mesin NON TIK	13	243.985.338	414	4.982.765.715	427	5.226.751.053
Peralatan & Mesin Khusus TIK	9	31.499.998	70	1.000.373.974	79	1.031.873.972
Alat Berat	-	-	4	614.774.765	4	614.774.765
Alat Senjata	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	-	-	3	26.580.019.989	3	26.580.019.989
Rumah Negara	-	-	-	-	-	-
Jalan & Jembatan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air & Irigasi	-	-	-	-	-	-
Instalasi & Jaringan	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	2	190.000	2	190.000
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
	24	618.085.336	498	33.587.417.806	522	34.205.503.142



c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan permohonan terkait (Penjualan dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan (Penjualan dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dengan nilai sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses permohonan ke pengelola”

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.”

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-	-

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rpxxx, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1			
2			



BerAKHLAK

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717 911515



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (401968)
SEMESTER I TAHUN 2026
NOMOR : 179/SEK.PTUN.W6-TUN5/PL1.2.5/VII/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30/06/2026), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T.
NIP : 19911128 202506 1 004
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP : 19900412 202012 1 009
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		Saldo Awal per 01 Januari 2026	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	19.320.240	2.440.484	21.760.724
1	Persediaan	19.320.240	2.440.484	21.760.724
B.	ASET TETAP	26.426.541.588	(887.673.695)	25.559.157.893
1	Tanah	25.308.000	0	25.308.000
2	Peralatan dan Mesin	7.664.791.903	0	7.664.791.903
3	Gedung dan Bangunan	26.580.019.989	0	26.580.019.989
4	Aset Tetap Lainnya	190.000	0	190.000
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.733.890.215)	(601.547.742)	(6.335.437.957)
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.109.878.089)	(265.835.953)	(2.375.714.042)
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000	(20.290.000)	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(20.290.000)	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	26.445.861.828	(885.233.211)	25.580.918.617
E	EKSTRAKOMPTABEL	24.413.250	0	24.413.250
F	TOTAL (D+E)	26.470.275.078	(885.233.211)	25.605.331.867

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni Tahun Anggaran 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset

Ovit Samuel Purba, S.T.
NIP. 199111282025061004

Operator GLP

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M.
NIP. 19811229 200604 2 015

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

1. TANDA TANGAN

keuangan

barang

II. PERIODE

1	2	2	5
---	---	---	---

UNIT ORGANISASI

1. Kode

0	0	5
---	---	---

0	1
---	---

3	0	0	0
---	---	---	---

4	0	1	9	6	8
---	---	---	---	---	---

0	0	0
---	---	---

K	D
---	---

2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.
---------	--

VIII. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

[illegible]

IX. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
							0
NIHIL							

X. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan
NIHIL						

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Barang

II. PERIODE			
0	6	/	2 6

UNIT ORGANISASI

1. Kode

005

-

01

-

3000

-

401968

-

000

-

K

D

2. Nama

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

III. SALDO AKHIR PERIODE

NO	PERKIRAAN NERACA	GLP	ASET TETAP	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	21.760.724	21.760.724	21.760.724
1	Persediaan	21.760.724	21.760.724	21.760.724
B	ASET TETAP	25.559.157.893	25.559.157.893	25.559.157.893
1	Tanah	25.308.000	25.308.000	25.308.000
2	Peralatan dan Mesin	7.664.791.903	7.664.791.903	7.664.791.903
3	Gedung dan Bangunan	26.580.019.989	26.580.019.989	26.580.019.989
4	Aset tetap lainnya	190.000	190.000	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-6.335.437.957	-6.335.437.957	-6.335.437.957
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-2.375.714.042	-2.375.714.042	-2.375.714.042
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	25.580.918.617	25.580.918.617	25.580.918.617
E	EKSTRAKOMPTABEL	24.413.250	24.413.250	24.413.250
F	TOTAL (D + E)	25.605.331.867	25.605.331.867	25.605.331.867

IV. DATA KOREKSI AUDIT SALDO NILAI BMN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	21.760.724	0	0	21.760.724
2	Persediaan	21.760.724	0	0	21.760.724
B	ASET TETAP	25.559.157.893	0	0	25.559.157.893
1	Tanah	25.308.000	0	0	25.308.000
2	Peralatan dan Mesin	7.664.791.903	0	0	7.664.791.903
3	Gedung dan Bangunan	26.580.019.989	0	0	26.580.019.989
4	Aset tetap lainnya	190.000	0	0	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-6.335.437.957	0	0	-6.335.437.957
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-2.375.714.042	0	0	-2.375.714.042
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	25.580.918.617	0	0	25.580.918.617
E	EKSTRAKOMPTABEL	24.413.250	0	0	24.413.250
F	TOTAL (D + E)	25.605.331.867	0	0	25.605.331.867

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN


Kasubag


barang

II. PERIODE

0

6

/

2

6

UNIT ORGANISASI

1. Kode

0

0

5

-

0

1

-

3

0

0

4

0

1

9

6

8

-

0

0

0

-

K

D

2. Nama

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR	0	0	0	0	0
1	Persediaan	0	0	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0	0	0	0
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0	0	0	0
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VI. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN
Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp.0,-

VII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.



BerAKHLAK

2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



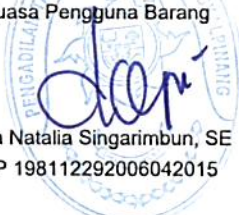
info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl.Cetak : 21/07/26 4:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	17,781,040
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,979,684
131111	Tanah	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,664,791,903
133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989
135121	Aset Tetap Lainnya	190,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,335,437,957)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,375,714,042)
J U M L A H		25,580,918,617

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) 01 Januari 2026

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111515



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2026(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tanggal : 21/07/26 4:55 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	16,096,240
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,224,000
131111	Tanah	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,664,791,903
133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989
135121	Aset Tetap Lainnya	190,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,733,890,215)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,109,878,089)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20,290,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(20,290,000)
J U M L A H		26,445,861,828



BerAKHLAK

4. Laporan Barang Persediaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tanggal : 21/07/26 4:56 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010108022	Gula	52,500
1010301001	Alat Tulis	847,800
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	95,000
1010301003	Penjepit Kertas	480,500
1010301004	Penghapus/Korektor	27,500
1010301005	Buku Tulis	455,000
1010301006	Ordner Dan Map	3,352,600
1010301007	Penggaris	32,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	91,000
1010301010	Alat Perekat	517,000
1010301012	Staples	8,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	30,000
1010302001	Kertas HVS	1,859,500
1010302002	Berbagai Kertas	683,100
1010302004	Amplop	174,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	255,000
1010303002	Tinta Cetak	140,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	985,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,390,900
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	281,800
1010306002	Lampu Listrik	442,800
1010306003	Stop Kontak	55,220
1010306005	Stacker	119,220
1010306010	Batu Baterai	723,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	42,000
1010307006	Atribut	1,550,000
1010309001	Meterai	223,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,569,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	24,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	274,600
Jumlah Barang Konsumsi		17,781,040
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	228,000
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	714,000
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	212,600
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	1,270,000
1010305006	Alat Pengikat	66,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	1,036,584
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	82,900
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	369,600
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		3,979,684
TOTAL		21,760,724

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |



BerAKHLAK

5. Laporan Barang Intrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9411513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 4:57 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 30 JUNI 2026	
			KUAN	TITAS	NILAI	KUAN	TITAS	NILAI	KUAN	TITAS	NILAI	NILAI	KUAN	TITAS
KODE	URAIAN		4	6	7	8	9	10	11					
1	2	3												
131111	Tanah		4,000	25,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	25,308,000
20101	TANAH PERSIL	-	4,000	25,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin		478	7,664,791,903	0	0	0	0	0	0	0	0	478	7,664,791,903
30103	ALAT BANTU	-	4	614,774,765	0	0	0	0	0	0	0	0	4	614,774,765
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	6	726,585,363	0	0	0	0	0	0	0	0	6	726,585,363
30501	ALAT KANTOR	-	97	1,027,575,799	0	0	0	0	0	0	0	0	97	1,027,575,799
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	278	4,004,383,820	0	0	0	0	0	0	0	0	278	4,004,383,820
30601	ALAT STUDIO	-	6	83,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	83,004,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	84,662,544	0	0	0	0	0	0	0	0	1	84,662,544
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	9,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9,790,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	4	12,398,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12,398,700
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	4	6,422,940	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6,422,940
31001	KOMPUTER UNIT	-	50	719,943,933	0	0	0	0	0	0	0	0	50	719,943,933
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	26	375,250,039	0	0	0	0	0	0	0	0	26	375,250,039
133111	Godong dan Bangunan		3	26,580,019,989	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26,580,019,989
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	25,256,592,619	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25,256,592,619
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	1,323,427,370	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,323,427,370
135121	Aset Tetap Lainnya		2	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	190,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	2	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	190,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	20,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20,290,000
30501	ALAT KANTOR	-	1	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,100,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,200,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	1	9,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,990,000
TOTAL				34,290,599,892		0						20,290,000		34,270,309,892

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang


Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

6. Laporan Barang Ekstrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_salker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
			BERTAMBAH		BERKURANG					
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		44	24,413,250	0	0	0	0	44	24,413,250
3050104002	Lemari Kayu	-	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	-	1	650,000	0	0	0	0	1	650,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-	1	905,700	0	0	0	0	1	905,700
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	9	4,050,000	0	0	0	0	9	4,050,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	11	5,240,000	0	0	0	0	11	5,240,000
3050201999	Meubelair Lainnya	-	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000
3050204006	Kipas Angin	-	3	1,005,000	0	0	0	0	3	1,005,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	2	630,000	0	0	0	0	2	630,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	-	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3060102165	Camera Conference	-	2	782,550	0	0	0	0	2	782,550
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	-	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000
3100202017	Speaker Komputer	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	5	3,950,000	0	0	0	0	5	3,950,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	-	3	2,550,000	0	0	0	0	3	2,550,000
TOTAL				24,413,250		0	0			24,413,250

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang


Dora Natalia Sugrimbun, SE
NIP. 198112292006042015



BerAKHLAK²

7. Laporan Barang Gabungan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026			MUTASI				BERKURANG			SALDO PER 30 JUNI 2026	
				KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
KODE	URAIAN			4	5		6	7			8	9	10	11	
1	2	3													
131111	Tanah			4,000	25,308,000		0	0	0	0	0	0	4,000	25,308,000	
2010104026	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	M2		4,000	25,308,000		0	0	0	0	0	0	0	4,000	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin			522	7,689,205,153		0	0	0	0	0	0	522	7,689,205,153	
3010304003	Stationary Generating Set	Unit		1	498,199,460		0	0	0	0	0	0	1	498,199,460	
3010305010	Pompa Air	Unit		3	116,575,305		0	0	0	0	0	0	3	116,575,305	
3020101003	Station Wagon	Unit		1	110,355,000		0	0	0	0	0	0	1	110,355,000	
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit		2	533,880,363		0	0	0	0	0	0	2	533,880,363	
3020104001	Sepeda Motor	Unit		3	82,350,000		0	0	0	0	0	0	3	82,350,000	
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah		30	113,995,898		0	0	0	0	0	0	30	113,995,898	
3050104002	Lemari Kayu	Buah		14	129,188,190		0	0	0	0	0	0	14	129,188,190	
3050104003	Rak Besi	Buah		2	3,916,080		0	0	0	0	0	0	2	3,916,080	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah		15	66,247,200		0	0	0	0	0	0	15	66,247,200	
3050104014	Mobile File	Buah		3	240,418,440		0	0	0	0	0	0	3	240,418,440	
3050105004	Fire Alarm	Buah		1	207,599,901		0	0	0	0	0	0	1	207,599,901	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah		1	158,215,790		0	0	0	0	0	0	1	158,215,790	
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah		24	39,160,800		0	0	0	0	0	0	24	39,160,800	
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah		1	650,000		0	0	0	0	0	0	1	650,000	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah		2	30,580,000		0	0	0	0	0	0	2	30,580,000	
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah		3	8,396,700		0	0	0	0	0	0	3	8,396,700	
3050105080	Mesin Antrian	Buah		1	27,500,000		0	0	0	0	0	0	1	27,500,000	
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy		3	4,162,500		0	0	0	0	0	0	3	4,162,500	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah		45	213,485,750		0	0	0	0	0	0	45	213,485,750	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah		129	583,636,230		0	0	0	0	0	0	129	583,636,230	
3050201004	Kursi Kayu	Buah		32	137,739,720		0	0	0	0	0	0	32	137,739,720	
3050201005	Slice	Buah		5	33,166,300		0	0	0	0	0	0	5	33,166,300	
3050201008	Meja Rapat	Buah		11	97,463,550		0	0	0	0	0	0	11	97,463,550	
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah		1	8,156,280		0	0	0	0	0	0	1	8,156,280	
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah		1	6,990,000		0	0	0	0	0	0	1	6,990,000	
3050201033	Sofa	set		19	222,591,630		0	0	0	0	0	0	19	222,591,630	
3050201038	Meja Penunjang Kantor	UNIT		1	5,000,000		0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy		12	42,386,450		0	0	0	0	0	0	12	42,386,450	
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah		1	950,000		0	0	0	0	0	0	1	950,000	
3050204002	A.C. Sentral	Buah		1	2,019,589,144		0	0	0	0	0	0	1	2,019,589,144	
3050204004	A.C. Split	Buah		6	30,000,000		0	0	0	0	0	0	6	30,000,000	
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah		2	56,443,500		0	0	0	0	0	0	2	56,443,500	
3050204006	Kipas Angin	Buah		3	1,005,000		0	0	0	0	0	0	3	1,005,000	
3050206002	Televisi	Buah		16	114,828,000		0	0	0	0	0	0	16	114,828,000	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:01 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG				SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026			MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
KODE	URAIAN		2		3	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1							4	5	6	7	8	9	10
3050206007	Loudspeaker			Buah	4	23.800.000	0	0	0	0	4	23.800.000	
3050206008	Sound System			Buah	3	165.097.306	0	0	0	0	3	165.097.306	
3050206020	Camera Video			Buah	1	17.125.000	0	0	0	0	1	17.125.000	
3050206030	Tiang Bendera			Buah	1	1.305.360	0	0	0	0	1	1.305.360	
3050206037	Mimbar/Podium			Buah	1	4.078.140	0	0	0	0	1	4.078.140	
3050206056	Karpet			Buah	1	28.138.500	0	0	0	0	1	28.138.500	
3050206057	Vertikal Blind			Buah	1	155.391.840	0	0	0	0	1	155.391.840	
3050206081	Tangki Air			Buah	2	43.055.320	0	0	0	0	2	43.055.320	
3050206085	Tempat Sampah			Buah	5	5.305.800	0	0	0	0	5	5.305.800	
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya			dummy	2	630.000	0	0	0	0	2	630.000	
3060101036	Microphone/Wireless MIC			Buah	1	550.000	0	0	0	0	1	550.000	
3060101042	Audio Master Control Unit			Buah	1	9.552.000	0	0	0	0	1	9.552.000	
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)			Buah	3	7.602.000	0	0	0	0	3	7.602.000	
3060101079	Microphone Cable			Buah	1	9.218.000	0	0	0	0	1	9.218.000	
3060102165	Camera Conference			Buah	3	57.414.550	0	0	0	0	3	57.414.550	
3060201001	Telephone (PABX)			Buah	1	84.662.544	0	0	0	0	1	84.662.544	
3060309999	Peralatan Antena UHF Lainnya			dummy	1	1.100.000	0	0	0	0	1	1.100.000	
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya			dummy	1	8.690.000	0	0	0	0	1	8.690.000	
3070101127	Kursi Dorong			Buah	2	9.787.980	0	0	0	0	2	9.787.980	
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan			Buah	1	950.000	0	0	0	0	1	950.000	
3070112999	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya			dummy	2	2.610.720	0	0	0	0	2	2.610.720	
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya			dummy	4	6.422.940	0	0	0	0	4	6.422.940	
3100101002	Mini Komputer			Buah	8	106.000.000	0	0	0	0	8	106.000.000	
3100101003	Local Area Network (LAN)			Buah	1	98.793.733	0	0	0	0	1	98.793.733	
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya			Buah	1	17.840.000	0	0	0	0	1	17.840.000	
3100102001	P.C Unit			Buah	16	199.032.200	0	0	0	0	16	199.032.200	
3100102002	Lap Top			Buah	15	202.930.000	0	0	0	0	15	202.930.000	
3100102003	Note Book			Buah	7	80.010.000	0	0	0	0	7	80.010.000	
3100102009	Tablet PC			Buah	2	15.338.000	0	0	0	0	2	15.338.000	
3100202017	Speaker Komputer			Buah	1	200.000	0	0	0	0	1	200.000	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			Buah	23	68.199.998	0	0	0	0	23	68.199.998	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)			Buah	3	28.570.211	0	0	0	0	3	28.570.211	
3100203017	External/ Portable Hardisk			Buah	3	2.550.000	0	0	0	0	3	2.550.000	
3100204001	Server			Buah	2	125.050.000	0	0	0	0	2	125.050.000	
3100204014	Rak Server			Buah	1	9.866.590	0	0	0	0	1	9.866.590	
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya			dummy	2	147.513.240	0	0	0	0	2	147.513.240	
133111	Gedung dan Bangunan				3	26.580.019.989	0	0	0	0	3	26.580.019.989	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:01 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026		
			BERTAMBAH		BERKURANG						
							KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS
KODE	URAIAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4010124017	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	UNIT	1	24,888,128,093	0	0	0	0	1	24,888,128,093	
4010130005	Bangunan Rumah Genset	Unit	1	368,464,526	0	0	0	0	1	368,464,526	
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	1,323,427,370	0	0	0	0	1	1,323,427,370	
135121	Aset Tetap Lainnya		2	190,000	0	0	0	0	2	190,000	
6010101001	Monografi	Buah	2	190,000	0	0	0	0	2	190,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	20,290,000	0	0	3	20,290,000	0	0	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	6,100,000	0	0	1	6,100,000	0	0	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	4,200,000	0	0	1	4,200,000	0	0	
3100102001	P.C Unit	Buah	1	9,990,000	0	0	1	9,990,000	0	0	
TOTAL				34,315,013,142			0	20,290,000		34,294,723,142	

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang


Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
Rincian per sub sub kelompok barang
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tanggal : 21/07/26 5:06 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S D 1 JANUARI 2026	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2026	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

9. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005

UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tanggal : 21/07/26 5:06 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_salker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026			MUTASI					SALDO PER 30 JUNI 2026	
			BERTAMBAH			BERKURANG						
						KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	URAIAN		KUANTITAS	NILAI							KUANTITAS	NILAI

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Penggina Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

10. Laporan Barang Bersejarah

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tanggal : 21/07/26 5:07 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_saiker_poc

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2026
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

11. Laporan Barang Rusak Berat

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111313



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
 KODE UAKPB : 401968

TANGGAL : 21-07-2026
 Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
 HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.017	1	Mesin Absensi	RUSAK BERAT	30-11-	-	-	30-11-2018	6,100,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	6	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	27-11-	-	-	27-11-2018	4,200,000	-	RB-Henti Guna
3	3.10.01.02.001	6	P.C Unit	RUSAK BERAT	30-11-	-	-	30-11-2018	9,990,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									20,290,000		20,290,000

PANGKALPINANG, 21 JULI 2026
 PENANGGUNG JAWAB UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
 NIP. 198112292006042015



BerAKHLAK

12. Laporan Barang Hilang

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
 KODE UAKPB : 401968

TANGGAL : 21-07-2026
 Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
 HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
Jumlah											

PANGKALPINANG, 21 JULI 2026
 PENANGGUNG JAWAB UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
 NIP. NIP. 198112292006042015



BerAKHLAK

13. Laporan Barang BPYBDS

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
 KODE UAKPB : 401968

TANGGAL : 21-07-2026
 Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
 HALAMAN: 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PANGKALPINANG, 21 JULI 2026
 PENANGGUNG JAWAB UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
 NIP. NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

14. Laporan Barang Hibah DK/TP

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 401968

TANGGAL : 21-07-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PANGKALPINANG, 21 JULI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP. NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_saker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANITAS		NILAI	SALDO AWAL		AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI BUKU
								MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8		
131111	Tanah		4,000	25,308,000	0	0	0	25,308,000		
2010104026	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	M2	4,000	25,308,000	0	0	0	25,308,000		
132111	Peralatan dan Mesin		478	7,664,791,903	(5,733,890,216)	(601,647,742)	(6,335,437,957)	1,329,353,946		
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	488,189,460	(284,685,407)	(35,585,676)	(320,271,083)	177,928,377		
3010305010	Pompa Air	Unit	3	116,575,305	(66,614,459)	(8,326,809)	(74,941,268)	41,634,037		
3020101003	Station Wagon	Unit	1	110,355,000	(110,355,000)	0	0	0		
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	533,880,363	(268,166,077)	(22,142,857)	(290,308,934)	243,571,429		
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	82,350,000	(52,078,571)	(2,328,571)	(54,407,142)	27,942,858		
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	30	113,985,898	(74,427,130)	(6,889,590)	(81,316,720)	32,679,178		
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	128,288,190	(91,781,733)	(12,168,819)	(103,950,552)	24,337,638		
3050104003	Rak Besi	Buah	2	3,916,080	(2,741,256)	(391,608)	(3,132,864)	783,216		
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	15	66,247,200	(50,872,590)	(5,124,870)	(55,997,460)	10,249,740		
3050104014	Mobile File	Buah	3	240,418,440	(176,982,558)	(21,145,294)	(198,127,852)	42,290,588		
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	207,599,901	(166,079,920)	(20,759,991)	(186,839,911)	20,759,990		
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	158,215,790	(126,572,632)	(15,821,579)	(142,394,211)	15,821,579		
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	24	39,160,800	(27,412,560)	(3,916,080)	(31,328,640)	7,832,160		
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	30,580,000	(24,464,000)	(3,058,000)	(27,522,000)	3,058,000		
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	7,491,000	(5,982,800)	(749,100)	(6,741,900)	749,100		
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	27,500,000	(24,750,000)	(2,750,000)	(27,500,000)	0		
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	3	4,162,500	(2,913,750)	(416,250)	(3,330,000)	832,500		
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	36	209,435,750	(165,205,025)	(14,743,575)	(179,948,600)	29,487,150		
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	118	578,396,230	(424,952,161)	(51,148,023)	(476,100,184)	102,296,046		
3050201004	Kursi Kayu	Buah	32	137,739,720	(102,357,804)	(11,793,972)	(114,151,776)	23,587,944		
3050201005	Sice	Buah	5	33,166,300	(33,166,300)	0	(33,166,300)	0		
3050201008	Meja Rapat	Buah	11	97,463,550	(68,224,485)	(9,746,355)	(77,970,840)	19,492,710		
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	8,156,280	(5,709,396)	(815,628)	(6,525,024)	1,631,256		
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	6,990,000	(6,990,000)	0	(6,990,000)	0		
3050201033	Sofa	set	19	222,591,630	(155,814,141)	(22,259,163)	(178,073,304)	44,518,326		
3050201038	Meja Penunjang Kantor	UNIT	1	5,000,000	(500,000)	(500,000)	(1,000,000)	4,000,000		
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	10	41,286,450	(28,900,515)	(4,128,645)	(33,029,160)	8,257,290		
3050204002	A.C. Sentral	Buah	1	2,019,589,144	(1,615,671,315)	(201,958,915)	(1,817,630,230)	201,958,914		
3050204004	A.C. Split	Buah	6	30,000,000	(30,000,000)	0	(30,000,000)	0		
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	2	56,443,500	(5,644,350)	(5,644,350)	(11,288,700)	45,154,800		
3050206002	Televisi	Buah	16	114,828,000	(93,742,200)	(11,482,800)	(105,225,000)	9,603,000		
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	23,800,000	(21,420,000)	(2,380,000)	(23,800,000)	0		
3050206008	Sound System	Buah	3	165,097,306	(120,065,645)	(13,940,831)	(134,006,476)	31,090,830		
3050206020	Camera Video	Buah	1	17,125,000	(11,987,500)	(1,712,500)	(13,700,000)	3,425,000		

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:14 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG				SALDO 30 JUNI 2026			
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN		
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	1,305,360	(913,752)	(130,536)	(1,044,288)
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	4,078,140	(2,854,698)	(407,814)	815,628
3050206056	Karpet	Buah	1	28,138,500	(19,696,950)	(2,813,850)	5,627,700
3050206057	Vertikal Blind	Buah	1	155,391,840	(108,774,288)	(15,539,184)	31,078,368
3050206081	Tangki Air	Buah	2	43,055,320	(34,444,256)	(4,305,532)	4,305,532
3050206085	Tempat Sampah	Buah	5	5,305,800	(3,714,060)	(530,580)	1,061,160
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	1	9,552,000	(8,596,800)	(955,200)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	3	7,602,000	(7,602,000)	0	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	9,218,000	(8,296,200)	(921,800)	0
3060102165	Camera Conference	Buah	1	56,632,000	(50,968,800)	(5,663,200)	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	84,662,544	(67,730,035)	(8,466,255)	8,466,254
3060309899	Peralatan Antena UHF Lainnya	dummy	1	1,100,000	(440,000)	(55,000)	605,000
3060310899	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	1	8,690,000	(3,476,000)	(434,500)	4,779,500
3070101127	Kursi Dorong	Buah	2	9,787,980	(6,851,566)	(978,798)	1,957,596
3070112999	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	dummy	2	2,610,720	(1,827,504)	(261,072)	522,144
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	4	6,422,940	(4,496,058)	(642,294)	1,284,588
3100101002	Mini Komputer	Buah	8	106,000,000	(106,000,000)	0	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	98,793,733	(98,793,733)	0	0
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000	(17,840,000)	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	16	199,032,200	(190,282,200)	(8,750,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	15	202,930,000	(184,813,750)	(15,616,250)	2,500,000
3100102003	Note Book	Buah	7	80,010,000	(10,001,250)	(10,001,250)	60,007,500
3100102009	Tablet PC	Buah	2	15,338,000	(11,256,250)	(1,917,250)	2,164,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	64,249,998	(33,050,000)	(5,756,250)	25,443,748
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	26,570,211	(21,498,935)	(3,571,276)	3,500,000
3100204001	Server	Buah	2	125,050,000	(125,050,000)	0	0
3100204014	Rak Server	Buah	1	9,866,590	(9,866,590)	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	2	147,513,240	(147,513,240)	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		3	26,560,019,989	(2,109,878,089)	(285,835,953)	24,204,305,947
4010124017	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	UNIT	1	24,888,128,093	(1,987,761,011)	(248,917,034)	22,651,450,048
4010130005	Bangunan Rumah Genset	Unit	1	368,464,526	(29,477,160)	(3,684,645)	335,302,721
4040104001	Pagar Permanaen	Unit	1	1,323,427,370	(92,639,918)	(13,234,274)	1,217,553,178
135121	Aset Tetap Lainnya		2	190,000	0	0	0
6010101001	Monografi	Buah	2	190,000	0	0	190,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	(20,290,000)	20,290,000	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	(6,100,000)	6,100,000	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	(4,200,000)	4,200,000	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:14 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
		Buah	0	0	(9.990,000)	9.990,000	0
3100102001	P.C Unit						
JUMLAH			4,483	34,270,309,892	(7,864,058,304)	(847,093,695)	(6,711,151,999)
							25,559,157,893

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE
NIP. 198112292006042015





BerAKHLAK

16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:15 PM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_salker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026				
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
132111	Peralatan dan Mesin		44	24,413,250	(22,462,235)	(574,505)	(23,036,740)
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1	900,000	(900,000)	0	(900,000)
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	650,000	(130,000)	(65,000)	(195,000)
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	905,700	(905,700)	0	(905,700)
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	9	4,050,000	(3,670,000)	(95,000)	(3,765,000)
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	11	5,240,000	(4,860,000)	(95,000)	(4,955,000)
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	2	1,100,000	(1,100,000)	0	(1,100,000)
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	950,000	(665,000)	(95,000)	(760,000)
3050204006	Kipas Angin	Buah	3	1,005,000	(1,005,000)	0	(1,005,000)
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	2	630,000	(630,000)	0	(630,000)
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	550,000	(385,000)	(55,000)	(440,000)
3060102165	Camera Conference	Buah	2	782,550	(705,285)	(25,755)	(731,040)
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	1	950,000	(950,000)	0	(950,000)
3100202017	Speaker Komputer	Buah	1	200,000	(175,000)	(25,000)	(200,000)
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	3,950,000	(3,831,250)	(118,750)	(3,950,000)
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3	2,550,000	(2,550,000)	0	(2,550,000)
JUMLAH			44	24,413,250	(22,462,235)	(574,505)	(23,036,740)
							9=5-8
							1,376,510
							0
							455,000
							0
							285,000
							285,000
							0
							190,000
							0
							0
							110,000
							51,510
							0
							0
							0
							0
							0
							1,376,510

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang





BerAKHLAK

17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9411513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



BerAKHLAK

18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



BerAKHLAK

19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/07/26 5:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_saiker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	134.000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	134.000	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	134.000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	134.000	0	0	0	0

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

II. PERIODE

06

/

26

UNIT ORGANISASI

1 Kode

005

-

0

1

-

300403429

-

000

-

KD

2 Nama

Perdagangan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR					
1	Kas di Bendahara Pengeluaran					
2	Persewaan					
B	ASET TETAP					
1	Tanah					
2	Peralatan dan Mesin					
3	Gedung dan Bangunan					
4	Aset Tetap Lainnya					
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin					
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan					
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan					
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan					
C	ASET LAINNYA					
1	Aset Tidak Berwujud					
2	Aset Lainnya					
D	SUB JUMLAH (A+B+C)					
E	Ekstrakomptabel					
F	TOTAL (D+E)					

VI. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN
Jumlah Aset Sengketa yang berasal dari pengalihan BMN pada periode Bulan Juni Tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp 0,-

NIHIL

VII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini

Pangkalpinang, 29 Oktober 2026
Penanggung Jawab IAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Dora Natalia Saragompu, SE, M.M
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



BerAKHLAK

21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513

www.ptun-pangkalpinang.go.idinfo@ptun-pangkalpinang.go.id



BerAKHLAK

22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



BerAKHLAK

DATA TAMBAHAN

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717 9111513



laporbarangkuasa@pnk-pangkalpinang.go.id



laporbarangkuasa@pnk-pangkalpinang.go.id



BerAKHLAK

1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI per 30 Juni 2026

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111515



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:20 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,275,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,781,040	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,979,684	0
0.0	131111	Tanah	25,308,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,335,437,957
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,375,714,042
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	958,396,396
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,275,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	41,002,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	36,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,481,325,152
0.0	391111	Ekuitas	0	24,706,654,535
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	819,493,640	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,494	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,401,338	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,667,522	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	31,410,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,533,102	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,499,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	82,352,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	69,380,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	44,550,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,496,677,940	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,960,900,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	124,319,250	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,215	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,071,987	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,182,255	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	18,865,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,910,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	369,901,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	340,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,550,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:20 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	82,414,322	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,155,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	91,775,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165,311,800	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143,864,579	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40,192,831	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	601,547,742	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265,835,953	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	27,219,100	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12,901,516	0
JUMLAH			44,938,805,582	44,938,805,582

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK

2. Neraca Tingkat Kementerian/Lembaga per 30 Juni 2026

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalanpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0712-9111518



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:20 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0	36,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,275,000	0	4,275,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	325,600	(325,600)	(100.00)
Persediaan	21,760,724	19,320,240	2,440,484	12.63
JUMLAH ASET LANCAR	62,035,724	19,645,840	42,389,884	215.77
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	7,664,791,903	0	0.00
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(8,711,151,999)	(7,843,768,304)	(867,383,695)	11.06
JUMLAH ASET TETAP	25,559,157,893	26,426,541,588	(867,383,695)	(3.28)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	20,290,000	(20,290,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(20,290,000)	20,290,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	25,621,193,617	26,446,187,428	(824,993,811)	(3.12)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	962,671,396	1,739,532,893	(776,861,497)	(44.66)
Utang Yang Belum Ditagihkan	41,002,500	0	41,002,500	0.00
Uang Muka dari KPPN	36,000,000	0	36,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,039,673,896	1,739,532,893	(699,858,997)	(40.23)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,039,673,896	1,739,532,893	(699,858,997)	(40.23)
EKUITAS				
Ekuitas	24,581,519,721	24,706,654,535	(125,134,814)	(0.51)
JUMLAH EKUITAS	24,581,519,721	24,706,654,535	(125,134,814)	(0.51)
JUMLAH EKUITAS	24,581,519,721	24,706,654,535	(125,134,814)	(0.51)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,621,193,617	26,446,187,428	(824,993,811)	(3.12)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:20 PM
Halaman : 2

Keterangan :
FINAL

lap_neraca_satker_komparatif_poc
Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015



BerAKHLAK²

3. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru Kecamatan Pangkajene, Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0712-9111512



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSFER MASUK
TANGGAL 02-01-2026 s/d 30-06-2026

NAMA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KODE : 005.01.3000.401968.000.KD

NO. SPPA		TGL. PEROLEHAN	NO. BUKTI PRLH	NAMA ASET	KETERANGAN
NO.	KD. ASET	TGL. BUKU	MERK/TYPE ASET	ASAL PEROLEHAN	
URUT	NO. ASET	KONDISI	KUANTITAS SATUAN	DASAR HARGA	
			NILAI PER SATUAN	TOTAL RUPIAH	



BerAKHLAK

4. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptu.pangkalpinang.go.id



ntu@ptu.pangkalpinang.go.id



BerAKHLAK²

5. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



071. 9111513



www.pangkalpinang.go.id



int@ptun.pangkalpinang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(OPNAME FISIK)

Nomor : 173/SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 401968
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI.

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enams bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Bendahara)
NIP : 199004122020121009
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T. (Teknisi Sarana & Prasarana).
NIP : 199111282025061004
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester I Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E., M.Si.

2. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.

3. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. BangkaBelitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Kode Satker : 005013000401968000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI.

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	1010108022000001	Gula	3	3	0	√	-
2	1010301001000002	Pena balliner	3	3	0	√	-
3	1010301001000004	Stabilo	4	4	0	√	-
4	1010301001000005	pena balliner	1	1	0	√	-
5	1010301001000008	Spidol Snowman Permanen	2	2	0	√	-
6	1010301001000009	Spidol Snowman Non permanen	4	4	0	√	-
7	1010301001000029	Pensil Voxy	1	1	0	√	-
8	1010301001000030	Pena Baliner pro	1	1	0	√	-
9	1010301001000032	Spidol hitam	4	4	0	√	-
10	1010301001000033	Pulpen jk hitam	6	6	0	√	-
11	1010301001000034	Pena JK 100	1	1	0	√	-
12	1010301001000035	Pena hapus deli	2	2	0	√	-
13	1010301002000012	Tinta Epson	1	1	0	√	-
14	1010301003000003	Binder clip 280	2	2	0	√	-
15	1010301003000006	Binder Clip 107	2	2	0	√	-
16	1010301003000018	Paper clip 107	3	3	0	√	-
17	1010301003000019	Paper Clip no 111	8	8	0	√	-
18	1010301003000021	Binder Clip 300 1	3	3	0	√	-
19	1010301003000022	Binder clip 105 1	2	2	0	√	-
20	1010301003000023	B.Clip 105	2	2	0	√	-
21	1010301003000024	B.Clip 155	2	2	0	√	-
22	1010301003000025	Clip no 3	1	1	0	√	-
23	1010301003000026	B. Clip 300	4	4	0	√	-
24	1010301003000027	Clip 280	1	1	0	√	-
25	1010301004000001	Tipe X	1	1	0	√	-
26	1010301004000004	Penghapus White Board	1	1	0	√	-
27	1010301004000006	Correction Tape 2	1	1	0	√	-
28	1010301005000009	Agenda Deli	7	7	0	√	-
29	1010301005000011	Buku Folio 2	1	1	0	√	-
30	1010301005000014	Agenda 25k	1	1	0	√	-
31	1010301005000015	Buku Dfolio	2	2	0	√	-
32	1010301006000002	Box Files	2	2	0	√	-
33	1010301006000004	Map Bisnis File	1	1	0	√	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. BangkaBelitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
34	1010301006000011	Map bolong	2	2	0	√	-
35	1010301006000027	Map Batik GM 1	2	2	0	√	-
36	1010301006000028	Map Kuning	14	14	0	√	-
37	1010301006000030	Box Files 3	2	2	0	√	-
38	1010301006000031	Map Folder	2	2	0	√	-
39	1010301006000033	Spring File	14	14	0	√	-
40	1010301006000034	Bantex	35	35	0	√	-
41	1010301006000036	Map Batik GM 2	1	1	0	√	-
42	1010301006000037	Map Plastik Kancing	1	1	0	√	-
43	1010301006000038	Stopmap sika	2	2	0	√	-
44	1010301006000039	Odner bindex	11	11	0	√	-
45	1010301006000040	Map L 1	1	1	0	√	-
46	1010301006000043	Box File Jumbo	20	20	0	√	-
47	1010301006000044	Odner warna	6	6	0	√	-
48	1010301006000046	Box File Sika biru	12	12	0	√	-
49	1010301006000047	Spring file map	1	1	0	√	-
50	1010301007000003	Penggaris besi 30cm	4	4	0	√	-
51	1010301007000004	Penggaris Besi 1	2	2	0	√	-
52	1010301007000005	Penggaris Besi Deli	1	1	0	√	-
53	1010301008000001	Cutter	4	4	0	√	-
54	1010301008000007	Cutter 2	2	2	0	√	-
55	1010301008000008	Isi Cutter 1	1	1	0	√	-
56	1010301008000009	Cutter kecil 1	1	1	0	√	-
57	1010301010000001	alat perekat	2	2	0	√	-
58	1010301010000002	Lakban Bening besar	3	3	0	√	-
59	1010301010000006	Double tip besar	6	6	0	√	-
60	1010301010000011	double tip kecil	3	3	0	√	-
61	1010301010000014	lakban hitam kecil	1	1	0	√	-
62	1010301010000020	Lem Korea	2	2	0	√	-
63	1010301010000026	Busa Perekat	7	7	0	√	-
64	1010301010000032	Perekat 3m	2	2	0	√	-
65	1010301010000035	Isolasi Kecil	3	3	0	√	-
66	1010301010000036	Isolasi Besar	4	4	0	√	-
67	1010301010000037	Double Tip Kecil 1	1	1	0	√	-
68	1010301010000042	Lakban hitam kecil 1	1	1	0	√	-
69	1010301010000043	Sign here 1	1	1	0	√	-
70	1010301010000044	Lem Stick 1	6	6	0	√	-
71	1010301010000046	Lakban H1	3	3	0	√	-
72	1010301010000047	Double Tip kecil 3	2	2	0	√	-
73	1010301010000048	Box File bindex	5	5	0	√	-
74	1010301012000007	pembuka straples	1	1	0	√	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. BangkaBelitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
75	1010301999000005	Pembolong Kertas (punch)	2	2	0	√	-
76	1010302001000010	Kertas HVS Biru	1	1	0	√	-
77	1010302001000012	Kertas F4 75 gr	3	3	0	√	-
78	1010302001000013	A4 75 gr	5	5	0	√	-
79	1010302001000014	HVS F4 75 gr	4	4	0	√	-
80	1010302001000019	Kertas A4 80 gram	1	1	0	√	-
81	1010302001000021	F4 warna biru	2	2	0	√	-
82	1010302001000022	A4 Sidu	5	5	0	√	-
83	1010302001000023	A4 sidu 75	3	3	0	√	-
84	1010302002000008	kertas stiker	1	1	0	√	-
85	1010302002000028	Kertas Jilid Bufallo	1	1	0	√	-
86	1010302002000029	Kertas Warna	1	1	0	√	-
87	1010302002000035	Post it 654 1	1	1	0	√	-
88	1010302002000037	Kertas Foto A4	2	2	0	√	-
89	1010302002000050	Post it 2	4	4	0	√	-
90	1010302002000051	Tisu Toilet 8	3	3	0	√	-
91	1010302002000058	Kertas foto double matte	2	2	0	√	-
92	1010302002000061	Glossy stiker foto	4	4	0	√	-
93	1010302002000062	Tisu toilet joly	5	5	0	√	-
94	1010302002000063	Kertas Stiker glossy	2	2	0	√	-
95	1010302004000006	Amplop Kabinet	1	1	0	√	-
96	1010302004000007	Amplop 90 pps	3	3	0	√	-
97	1010302004000008	Amplop C Kabinet	2	2	0	√	-
98	1010302004000010	Amplop Coklat 1	1	1	0	√	-
99	1010302004000011	Amplop C F4	1	1	0	√	-
100	1010302999000009	Kertas Foto	2	2	0	√	-
101	1010302999000010	PP Pocket	2	2	0	√	-
102	1010302999000011	Mika bening F4	3	3	0	√	-
103	1010302999000013	Sampul plastik 1	1	1	0	√	-
104	1010303002000001	Tinta Refill 4	4	4	0	√	-
105	1010303999000005	Kwitansi Pengembalian Sisa panjar	10	10	0	√	-
106	1010303999000007	Tanda Terima PNB	10	10	0	√	-
107	1010303999000025	SKUM	10	10	0	√	-
108	1010303999000030	Sign Holder	5	5	0	√	-
109	1010304004000002	Tinta refill 1	4	4	0	√	-
110	1010304004000003	Tinta Printer 1	6	6	0	√	-
111	1010304004000004	Tinta Canon	9	9	0	√	-
112	1010304004000005	Tinta canon hitam	1	1	0	√	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. BangkaBelitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
113	1010304004000006	Tinta cannon warna	6	6	0	√	-
114	1010304999000005	Konektor HDMI	1	1	0	√	-
115	1010304999000009	HDMI Splitter	1	1	0	√	-
116	1010304999000010	HDTV Dongle	1	1	0	√	-
117	1010305001000009	Sikat WC 1	3	3	0	√	-
118	1010305001000010	Sikat WC 2	2	2	0	√	-
119	1010305001000014	Sikat 2	2	2	0	√	-
120	1010305001000015	Sikat WC 3	2	2	0	√	-
121	1010305002000007	Kanebo Mobil	1	1	0	√	-
122	1010305002000008	Kain Microfiber	2	2	0	√	-
123	1010305002000012	Kain serbet kecil	9	9	0	√	-
124	1010305002000014	Kanebo 2	6	6	0	√	-
125	1010305002000015	Pel Lantai 2	4	4	0	√	-
126	1010305002000016	Lap Gantung	10	10	0	√	-
127	1010305003000003	Ember Pel	2	2	0	√	-
128	1010305003000005	Ember Hitam	2	2	0	√	-
129	1010305004000008	Keset Kaki 1	2	2	0	√	-
130	1010305004000010	Keset Kaki 2	3	3	0	√	-
131	1010305004000011	Keset Kaki 3	2	2	0	√	-
132	1010305004000014	Keset	4	4	0	√	-
133	1010305004000015	Kantong Hitam	5	5	0	√	-
134	1010305004000016	Plastik sampah Pax	5	5	0	√	-
135	1010305004000017	Plastik uk 40	8	8	0	√	-
136	1010305006000001	Benang	1	1	0	√	-
137	1010305006000003	Tali Jilid	1	1	0	√	-
138	1010305006000005	Tali tambang	1	1	0	√	-
139	1010305008000052	Semprotan Nyamuk 1	1	1	0	√	-
140	1010305008000063	Porstek	3	3	0	√	-
141	1010305008000067	Pencuci Pakaian	1	1	0	√	-
142	1010305008000071	Detergen	4	4	0	√	-
143	1010305008000072	Bayclin	2	2	0	√	-
144	1010305008000073	Penghilang noda	2	2	0	√	-
145	1010305008000077	Kamper 1	6	6	0	√	-
146	1010305008000078	Bayclin 1	1	1	0	√	-
147	1010305008000079	Pencuci piring 2	2	2	0	√	-
148	1010305008000080	Pencuci Piring 3	3	3	0	√	-
149	1010305008000081	Karbol	9	9	0	√	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. BangkaBelitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
150	1010305008000082	Karbol SOS	7	7	0	√	-
151	1010305008000083	Spray Nyamuk	2	2	0	√	-
152	1010305008000084	Kamper 2	10	10	0	√	-
153	1010305008000086	Karbol lantai 1	6	6	0	√	-
154	1010305008000087	Karbol lantai 2	4	4	0	√	-
155	1010305008000088	Sunlight	5	5	0	√	-
156	1010305008000089	Karbol 3	4	4	0	√	-
157	1010305009000007	Piring 1	1	1	0	√	-
158	1010305009000026	mangkok plastik	2	2	0	√	-
159	1010305999000068	Acrilic A5	1	1	0	√	-
160	1010305999000071	Wiper Kaca 1	1	1	0	√	-
161	1010305999000072	Hanger 1	2	2	0	√	-
162	1010305999000074	Papan Tulis	1	1	0	√	-
163	1010305999000076	Jam dinding 1	2	2	0	√	-
164	1010306002000011	Lampu 14,5 w philips	2	2	0	√	-
165	1010306003000002	stop kontak	2	2	0	√	-
166	1010306005000004	stacker listrik 1	2	2	0	√	-
167	1010306005000008	Stacker putih	3	3	0	√	-
168	1010306005000009	Stacker T	2	2	0	√	-
169	1010306010000001	Baterai AA	2	2	0	√	-
170	1010306010000017	Baterai abc AAA	27	27	0	√	-
171	1010306999000010	Sekring 25 ampere	4	4	0	√	-
172	1010306999000011	Terminal 4 lobang	1	1	0	√	-
173	1010307006000001	Bendera	1	1	0	√	-
174	1010307006000002	Kalung Jabatan	1	1	0	√	-
175	1010309001000001	Materai	20	20	0	√	-
176	1010309001000002	Meterai 1	2	2	0	√	-
177	1010309999000032	Kwitansi 1	1	1	0	√	-
178	1010309999000034	Catridge 811 warna	3	3	0	√	-
179	1010309999000035	Catridge 810 hitam	1	1	0	√	-
180	1010309999000036	Catridge canon 810	1	1	0	√	-
181	1010310999000002	Tali Name Tag Campur	12	12	0	√	-
182	1010399999000003	Racun Serangga	1	1	0	√	-
183	1010399999000012	Spon cuci piring	2	2	0	√	-
184	1010399999000109	Racun Serangga 4	1	1	0	√	-
185	1010399999000118	Sarung Tangan	4	4	0	√	-
186	1010399999000125	Alat cuci piring	3	3	0	√	-
187	1010399999000130	Kopi kemasan 8	5	5	0	√	-
188	1010399999000131	Sabun tangan kemasan	4	4	0	√	-
189	1010399999000132	Alat gosok piring	1	1	0	√	-
190	1010399999000133	Spons piring	1	1	0	√	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Tim Pelaksana Stock Opname :

1. MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.
2. FANNY RUSPANJI, S.E.I.
3. OVIT SAMUEL PURBA, S.T.

: 
: 
: 

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA BARANG


Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

